



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS ,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan | | | |
| a. Semula | Rp | 867.844.299.968,86 | |
| b. Bertambah | Rp | 36.564.628.888,28 | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | | Rp 904.408.928.857,14 |
| 2. Belanja | | | |
| a. Semula | Rp | 915.550.379.966,64 | |
| b. Bertambah | Rp | 47.388.850.850,34 | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | | Rp 962.939.230.816,98 |
| Surplus / (Defisit) setelah Perubahan | | | Rp -58.530.301.959,84 |
| 3. Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Semula | Rp | 87.515.983.276,80 | |
| 2) Bertambah | Rp | 11.364.605.454,95 | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp 98.880.588.731,75 |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) Semula | Rp | 39.809.903.279,02 | |
| 2) Bertambah | Rp | 540.383.492,89 | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp 40.350.286.771,91 |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan | | | Rp 58.530.301.959,84 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

| | | | | |
|---|----|-------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 45.025.069.711,74 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 1.756.289.415,89 | | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | | Rp | 46.781.359.127,63 |

b. Dana perimbangan

| | | | | |
|---|----|--------------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 750.851.257.365,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 267.379.175,00 | | |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | | Rp | 751.118.636.540,00 |

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

| | | | | |
|---|----|-------------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 71.967.972.892,12 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 34.540.960.297,39 | | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp | 106.508.933.189,51 |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

| | | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.221.750.000,00 | | |
| 2) Berkurang | Rp | 1.212.250.000,00 | | |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | | | Rp | 9.009.500.000,00 |

b. Retribusi daerah

| | | | | |
|---|----|------------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.754.009.128,60 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 327.132.400,00 | | |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | | | Rp | 6.081.141.528,60 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | | | | |
|--|----|------------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.499.780.810,81 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 540.383.492,89 | | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp | 3.040.164.303,70 |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

| | | | | |
|--|----|-------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 26.549.529.772,33 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 2.101.023.523,00 | | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp | 28.650.553.295,33 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana bagi hasil

| | | | | |
|--|----|-------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 39.145.181.365,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 267.379.175,00 | | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp | 39.412.560.540,00 |

b. Dana alokasi umum

| | | | | |
|-----------|----|--------------------|--|--|
| 1) Semula | Rp | 622.612.006.000,00 | | |
|-----------|----|--------------------|--|--|

| | | | | |
|---|----|-------------------|--------------------|--|
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp | | 622.612.006.000,00 | |
| c. Dana alokasi khusus | | | | |
| 1) Semula | Rp | 89.094.070.000,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp | | 89.094.070.000,00 | |
| (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan | | | | |
| a. Hibah | | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp | | 0,00 | |
| b. Dana darurat | | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah Dana darurat setelah Perubahan | Rp | | 0,00 | |
| c. Dana bagi hasil pajak | | | | |
| 1) Semula | Rp | 18.401.763.095,16 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 1.323.467.956,84 | | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp | | 19.725.231.052,00 | |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus | | | | |
| 1) Semula | Rp | 39.051.166.680,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 32.888.086.320,00 | | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | Rp | | 71.939.253.000,00 | |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | | | | |
| 1) Semula | Rp | 14.294.000.000,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | Rp | | 14.294.000.000,00 | |
| f. Dana Infrastruktur sarana dan prasarana | | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah dana infrastruktur sarana dan prasarana setelah Perubahan | Rp | | 0,00 | |
| g. Bagi hasil sumbangan pihak III provinsi | | | | |
| 1) Semula | Rp | 221.043.116,96 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 329.406.020,55 | | |
| Jumlah bagi hasil sumbangan pihak III provinsi setelah Perubahan | Rp | | 550.449.137,51 | |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung

| | | | | |
|--|----|--------------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 510.188.584.845,23 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 35.582.908.289,68 | | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | | Rp | 545.771.493.134,91 |
| b. Belanja Langsung | | | | |
| 1) Semula | Rp | 405.361.795.121,41 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 11.805.942.560,66 | | |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | | | Rp | 417.167.737.682,07 |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : | | | | |
| a. Belanja pegawai sejumlah | | | | |
| 1) Semula | Rp | 462.254.752.011,40 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 35.211.976.000,00 | | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | | Rp | 497.466.728.011,40 |
| b. Belanja bunga | | | | |
| 1) Semula | Rp | 2.804.325.953,83 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 937.729.310,46 | | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | | Rp | 3.742.055.264,29 |
| c. Belanja subsidi | | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | | | Rp | 0,00 |
| d. Belanja hibah | | | | |
| 1) Semula | Rp | 10.737.400.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 443.500.000,00 | | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | | Rp | 11.180.900.000,00 |
| e. Belanja bantuan sosial | | | | |
| 1) Semula | Rp | 1.778.262.280,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 164.500.000,00 | | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | | Rp | 1.942.762.280,00 |
| f. Belanja bagi hasil | | | | |
| 1) Semula | Rp | 580.821.500,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp | 580,821,500.00 |
| g. Belanja bantuan keuangan | | | | |
| 1) Semula | Rp | 26.593.179.720,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | | | Rp | 26.593.179.720,00 |
| h. Belanja tidak terduga | | | | |
| 1) Semula | Rp | 5.439.843.380,00 | | |
| 2) Berkurang | Rp | 1.174.797.020,78 | | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | | Rp | 4.265.046.359,22 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

| | | | | |
|----|--|----|--------------------------|-----------------------|
| a. | Belanja pegawai | | | |
| | 1) Semula | Rp | 33.153.533.208,00 | |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>2.665.997.300,00</u> | |
| | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | | Rp 35.819.530.508,00 |
| b. | Belanja barang dan jasa | | | |
| | 1) Semula | Rp | 124.743.941.058,41 | |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>14.518.908.232,66</u> | |
| | Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | | Rp 139.262.849.291,07 |
| c. | Belanja modal | | | |
| | 1) Semula | Rp | 247.464.320.855,00 | |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>5.378.962.972,00</u> | |
| | Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | | Rp 242.085.357.883,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--------------------------|----------------------|
| a. | Penerimaan | | | |
| | 1) Semula | Rp | 87.515.983.276,80 | |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>11.364.605.454,95</u> | |
| | Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | | Rp 98.880.588.731,75 |
| b. | Pengeluaran | | | |
| | 1) Semula | Rp | 39.809.903.279,02 | |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>540.383.492,89</u> | |
| | Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp 40.350.286.771,91 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | | | |
|----|--|----|--------------------------|----------------------|
| a. | SILPA tahun anggaran sebelumnya | | | |
| | 1) Semula | Rp | 40.721.951.105,45 | |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>11.364.605.454,95</u> | |
| | Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | | Rp 52.086.556.560,40 |
| b. | Pencairan dana cadangan | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah | | | |
| | 1) Semula | Rp | 46.794.032.171,35 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah pinjaman daerah setelah Perubahan | | | Rp 46.794.032.171,35 |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | | |

| | | | | |
|--|----|-------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | | | Rp | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah | | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | | | Rp | 0,00 |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | | | | |
| a. Pembentukan dana cadangan | | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | | | |
| 1) Semula | Rp | 2.499.780.810,81 | | |
| 2) Bertambah | Rp | 540.383.492,89 | | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | | | Rp | 3.040.164.303,70 |
| c. Pembayaran pokok utang | | | | |
| 1) Semula | Rp | 36.980.122.468,21 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan | | | Rp | 36.980.122.468,21 |
| d. Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah | | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan | | | Rp | 0,00 |
| e. Pembayaran kegiatan belanja | | | | |
| 1) Semula | Rp | 330.000.000,00 | | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah pembayaran kegiatan belanja setelah Perubahan | | | Rp | 330.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI SAMBAS,

ttd.

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2012

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 4

| Pejabat | Paraf | Tanggal |
|---|-------|---------|
| Sekretaris Daerah Kab.Sambas | | |
| Asisten Administrasi Umum dan Aparatur | | |
| Kabag Hukum dan Perundang-undangan | | |
| Kabag Keuangan | | |

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2011

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 8